

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa,2012)
- Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama: Jakarta)
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Poidana*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta)
- Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal*, (Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, 2010)
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta)
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Pers,Makassar,2016)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003)
- Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. (Sinar Grafika: Jakarta)
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010)

- Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman)
- Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana(Disertasi)*, (Makassar, 2012)
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rieka Cipta: Jakarta)
- M. Nahir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Kalarta: PT. Sinar Grafika,2012)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (bina cipta, Bandung, 1983)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. (PT. Rineka Cipta: Jakarta)
- Trisha Aprillia Sinewe, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia*, (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019)
- Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-531  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

23 Oktober 2020

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros  
di  
Maros

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Nomor: 6515/UN4.5.1/PT.01.04/2020 tanggal 14 Oktober 2020 hal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Maghfirah Nasruddin  
NIM : B012191024  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Sebagai bahan untuk menyusun Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan Korban Kekerasan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 26 November 2020, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin  
NIP.196212311984121001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.